



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES
INDUSTRI INTERNASIONAL.

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EKO SUSENO AGUNG CAHYANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **411076**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.162.360.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/186 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000.000
2. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 477.360.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/705 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 720.000.000

1. MOTOR, VESPA PIAGIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 410.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.154.802.541**F. HARTA LAINNYA** Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 10.547.162.541

III. HUTANG Rp. 516.909.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

10.030.253.541

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.